



Pemkab Badung Siapkan Anggaran Rp 8 M

MANGUPURA, NusaBali

Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pariwisata menyiapkan anggaran Rp 8 miliar untuk fasilitasi penumpang yang terdampak penutupan Bandara Ngurah Rai, akibat erupsi Gunung Agung. Anggaran miliaran ini merupakan dana taktis anggaran tak terduga. Anggaran yang disiapkan ini bisa akan lebih besar dan juga bisa lebih kecil.

Kepala Dinas Kabupaten Badung, I Made Badra dikonfirmasi, Jumat (29/6) mengatakan, Pemkab Badung memberikan perhatian khusus dengan masalah penutupan bandara ini. Keadaan seperti ini kata dia telah dipersiapkannya jauh-jauh hari. "Telah disiapkan Rp 8 miliar dana tentatif untuk masalah ini. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Seandainya lebih dari sehari pemerintah sudah siap. Berapapun besarnya anggaran

yang dibutuhkan pemerintah siap menanggulangnya," ungkapnya.

Dikatakannya, untuk para penumpang yang terdampak akibat kondisi ini yang menginap di hotel yang telah tergabung dengan PHRI diberi gratis inap semalam. Namun demikian dia mengatakan kondisi ini akan terus dievaluasi terkait perkembangan terkini.

Dia mengaku telah mendapat informasi dari sejumlah travel agent bahwa tamunya tetap berangkat dengan menggunakan bus gratis. Center point untuk pelayanan penumpang dengan menggunakan bus gratis center poinya di Bandara Ngurah Rai. "Untuk yang menginap gratis itu termasuk breakfast. Bila secepatnya klarifikasi mengenai navigasi bisa terbang maka akan diutamakan dan dijamin terangkut semua. Untuk hotel yang bisa inap gratis adalah hotel yang sudah konfirmasi," pungkasnya.

Sementara itu, cancel kedatangan maupun keberangkatan wisatawan terjadi menyusul sempat terjadinya penutupan Bandara Ngurah Rai, Jumat (29/6).

Marketing Manager Inna Grand Bali Beach Sanur Ni Ketut Ari Sulistiari, mengakui imbas dari erupsi Gunung Agung tersebut.

Menurutnya, pada Jumat (29/6) kemarin, ada sejumlah tamu/wisatawan yang semestinya check out, karena terjadi penutupan bandara, tamu dalam group tersebut menunda keberangkatan dan extend sehari sambil menunggu perkembangan. "Mereka extend sampai besok (Sabtu, 30/6) sambil melihat perkembangannya seperti apa," ujar Ari Sulistiari.

Pihak manajemen lanjut Ari Sulistiari, sudah melakukan pertemuan dengan wisman tersebut. Mereka juga sempat diajak ke bandara untuk melihat kondisi di lapangan seperti apa. Sampai

Edisi : Sabtu, 30 Jun 2018

Hal : 2



akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa tinggal.

Dikatakan, mereka juga tidak meminta kompensasi, karena memahami kondisinya force majeure. "Dan secara kebetulan karena merupakan group, sementara dibayar oleh yayasan yang mengirim, karena mereka belum bisa terbang," ungkapnya.

Bagaimana seandainya perkembangan erupsi berlanjut, sehingga wisman terpaksa memperpanjang masa tinggal? Ari Sulistiari menyatakan pihaknya pasti akan melakukan antisipasi. "Kami akan lihat perkembangan dulu," ujarnya.

Selain tamu yang batal check out, Ari Sulistiari juga mengakui ada tamu yang batal datang (check in). Namun kebanyakan yang pemesan perseorangan atau personel, terutama mereka yang via online. "Kalau tamu group, sampai saat ini belum ada yang cancel. Semua masih

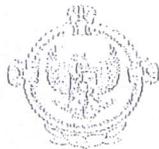
on," katanya sembari menyebut sejauh ini, belum ada keluhan dari wisatawan terkait penutupan bandara.

Secara terpisah, Mangku Suteja dari Bali Villa Asosiation, juga mengiyakan erupsi Gunung Agung sudah berimbas langsung terhadap kondisi pariwisata, akibat penutupan bandara. "Yang akan balik ke negaranya, maupun yang akan datang hari ini (Jumat kemarin) menunda keberangkatan. Ada juga yang membatalkan kedatangan," ujar Mangku Suteja yang merupakan Penasehat Bali Villa Asosiation.

Menurut Mangku Suteja, kalangan industri sudah melakukan upaya membantu tamu. Diantaranya dengan memberi diskon 50 persen harga kamar. Ada juga yang memberikan free stay, untuk satu malam. "Semoga tidak berlangsung lama, sehingga perekonomian tak terganggu," ujarnya. **p, k17**

Edisi : Sabtu, 30 Juni 2018

Hal : 2



Kekayaan Buleleng Tercatat

Rp 2,275 Miliar

SINGARAJA, NusaBali

Pemkab Buleleng makin kaya. Jika pada tahun 2016, jumlah kekayaan tercatat sebesar Rp 1,912 miliar, maka tahun 2017 sudah menembus Rp 2,275 miliar. Nilai kekayaan itu berupa aset lancar sebesar Rp 190,99 miliar, aset tetap Rp 1,91 miliar, investasi jangka panjang Rp 154,95 miliar, dan aset lainnya sebesar Rp 33,63 miliar.

Nilai kekayaan itu terungkap dalam nota pengantar Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2017, yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng, Senin (25/6) di Gedung Dewan, Jalan Veteran Singaraja.

Sejatinya nilai aset Buleleng tercatat sebesar Rp 2,29 miliar, namun karena ada kewajiban jangka pendek yang dibayarkan sebesar Rp 15,49 miliar, maka kekayaan bersih menjadi Rp 2,275 miliar. Artinya, kekayaan bersih Buleleng naik sebesar Rp 363,33 miliar.

"Peningkatan kekayaan bersih itu diperoleh dari surplus laporan operasional sebesar Rp 200,52 miliar, dan hasil koreksi kekayaan, akibat perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi pencatatan sebesar Rp 162,69 miliar," sebut Bupati Suradnyana.

Dalam nota pengantar itu juga terungkap jumlah sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) pada APBD Tahun 2017, terhitung sebe-

sar Rp 93,851 miliar. Besarnya jumlah Silpa itu dianggap keberhasilan dalam menerapkan efisiensi penggunaan anggaran. Dalam nota pengantar, Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana menyebut, Silpa sebesar Rp 93,851 miliar merupakan sisa kas pertanggal 31 Desember 2017, yang terdiri dari saldo kas daerah sebesar Rp 55,03 miliar, saldo kas bendahara Rp 40,6 miliar, saldo kas BLU RSUD Buleleng Rp 17,56 miliar, saldo kas dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) sebesar Rp 18,13 miliar, saldo kas bendahara penerimaan Rp 224,39 juta, dan saldo kas lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintah sebesar Rp

2,84 miliar.

"Ini karena kita berhasil lakukan efisiensi dalam tender kegiatan. Sehingga semua sisa tender itu kembali ke kas daerah, sehingga saldo kas daerah memang besar," terang Sekda Buleleng, Dewa Ketut Puspaka, usai rapat paripurna.

Dikatakan, jumlah Silpa itu akan dimanfaatkan kembali sesuai peruntukannya yang disusun pada APBD Perubahan 2018 nanti. Karena ada beberapa pos anggaran yang menjadi Silpa, sudah memiliki juklak dan jukni dalam pemanfaatannya. "Nah yang belum memiliki jukni dan juklanya, nanti pemanfaatannya kita bahas bersama dengan lembaga dewan," imbuh Sekda Puspaka. **k19**



Bupati Eka Sampaikan 4 Ranperda di Rapat Paripurna

TABANAN, NusaBali

Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti menyampaikan empat buah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) kepada DPRD Kabupaten Tabanan untuk dibahas pada Rapat Paripurna ke-8 Tahun 2018 di aula Sidang DPRD Tabanan, Senin (25/6).

Disampaikannya 4 Ranperda tersebut untuk menanggapi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), yang merupakan opini tertinggi atas audit laporan keuangan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Bali pada 28 Mei 2018.

Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomer 1 Tahun 2016 tentang Penataan Toko Swalayan.

Dalam sidang yang dibuka oleh Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi didampingi para Wakil DPRD Tabanan, Wakil Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya dan Forkopinda Tabanan serta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Tabanan, Bupati Eka mengajak memperhatikan yang sudah didapat, yakni opini WTP empat kali berturut-turut. Dan selalu melakukan pembenahan karena masih banyak kelemahan meskipun mendapatkan WTP.

"Mohon dipertahankan, karena membuat lebih mudah daripada merawat. Dan jangan sampai opini WTP ini membuat kita lupa diri, namun sebagai bahan evaluasi untuk menjadi yang lebih baik," tegasnya.

Bupati Eka juga menyampaikan gambaran umum re-

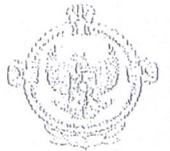
alisasi APBD Tabanan tahun anggaran 2017. Pendapatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,91 triliun lebih, sampai akhir tahun realisasinya sebesar Rp 1,87 triliun.

Belanja daerah dan transfer dianggarkan sebesar Rp 2,18 triliun lebih, realisasinya mencapai sebesar Rp 1,86 triliun lebih atau 85 persen. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp 1,33 triliun lebih, belanja modal Rp 290 miliar lebih, belanja tak terduga sebesar Rp 92,2 juta dan transfer Rp 240 miliar lebih.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 148 miliar lebih yang berasal dari Silpa tahun anggaran 2016 sebesar Rp 65,2 miliar lebih, dan penerimaan kembali dana bergulir sebesar Rp 637 juta lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 10,4 miliar, untuk penyertaan modal sebesar Rp 10,2 miliar, pembayaran pokok utang sebesar Rp 78 juta lebih, dan pembentukan dana bergulir sebesar Rp 150 juta, sehingga besarnya pembiayaan sejumlah Rp 55,4 miliar lebih.

Pemkab Tabanan memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) sebesar Rp 65,32 miliar lebih yang terdiri dari saldo pada rekening kas daerah sebesar Rp 41,84 miliar lebih, kas di bendahara penerimaan Rp 100 juta lebih, kas di bendahara JKN Rp 6,61 miliar lebih, kas dana pendidikan Rp 251 juta lebih, kas dana BOS Rp 2,96 miliar lebih dan saldo kas pada rekening kas di BRSU Tabanan selaku BLUD sebesar Rp 13,54 miliar lebih, jelas Bupati Eka.

Bupati Eka berharap keempat ranperda yang diajukan eksekutif mendapat perhatian dan dilakukan pembahasan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada di DPRD. 



RPH Sapi di Tukad Unda Kurang Terawat



Kondisi RPH di Banjar Suka Duka Kali Unda, Kelurahan Semarapura Kangin, Klungkung, Kamis (21/6). • IST

SEMARAPURA, NusaBali

Kondisi rumah potong hewan (RPH) sapi di Banjar Suka Duka Kali Unda, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan/Kabupaten Klungkung, memprihatinkan. Selain kondisi bangunannya yang kurang terawat, aktivitas pemotongan hewan di RPH ini sangat sedikit.

Dinas Pertanian Klungkung yang membidangi masalah ini akan mengkaji apakah RPH ini masih layak ditempatkan di sana. Pasalnya RPH tersebut dibangun cukup lama, sementara kondisi sekarang tentu sangat berbeda. Bahkan di depan RPH juga merupakan akses menuju obyek wisata Tukad Unda, yang kian ramai dikunjungi wisatawan.

Pantauan NusaBali Kamis (21/6), areal RPH nampak kurang terawat, bahkan sebuah bangunan pada sisi selatan dijadikan tempat menaruh material kayu, bambu dan tangga. Kepala Dinas Pertanian Klungkung Ida Bagus Gde Juanida saat dihubungi, tidak

menampik kondisi tersebut. Dia mengakui, RPH ini kurang terawat karena pekan terakhir ini jarang ada aktivitas pemotongan hewan. Di samping itu, tidak ada petugas khusus untuk itu. "Yang saya tahu rata-rata setiap hari ada motong ekor sapi. Kadang-kadang juga belum tentu ada yang motong pada hari-hari tertentu. Untuk kebersihan daging potong masih aman karena pembersihannya menggunakan air PDAM," katanya. Sementara itu, pengawasannya dengan mengambil sampel daging sapi di Pasar Galiran rutin setiap hari.

Pihaknya akan mengkaji kembali untuk pengembangan RPH ini atau akan dipindah, termasuk melihat aspek kuantitas pemotongan. "Nanti saya tugaskan kepala bidangnya, apakah perlu kajian seperti apa," katanya. Bangunan RPH di Banjar Suka Duka Kali Unda sudah lama, pernah direhab tahun 2000. **wan**

Edisi : Jumat, 22 Juni 2018

Hal : 6